

Politik Identitas dan Negosiasi Kebhinekaan dalam Ruang Publik Digital Indonesia

Ahmad Ridwansyah Perdana¹, Nurlaila Oktaviani Safitri², Muhammad Syahril Anwari³

¹ Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, STAI Prabumulih, Prabumulih, Indonesia

² Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, STAI Prabumulih, Prabumulih, Indonesia

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, Indonesia

Corresponding Author: ahmadridwansyah@gmail.com^{1*}, nurlailaoktavianisafitri@gmail.com²

Info Artikel

Received: 25 Desember 2025

Revised : 10 Januari 2026

Accepted: 29 Januari 2026

Published: 06 Februari 2026

Keywords:

Identity politics; digital
pluralism; public sphere;
identity negotiation

Kata Kunci:

Politik identitas; kebhinekaan
digital; ruang publik; negosiasi
identitas

Abstract

Identity politics has intensively developed in Indonesia's digital public sphere alongside the expanding use of social media. This study aims to analyze patterns of pluralism negotiation occurring on digital platforms and the dynamics of collective identity formation amid Indonesia's diverse society. A critical discourse analysis method was applied to social media content from Twitter/X, Instagram, and YouTube during the period 2023–2025, involving 1,200 purposively selected content items. The findings reveal that ethnicity- and religion-based identity politics dominates digital discourse, yet negotiation mechanisms also emerge that generate spaces for pluralism dialogue. Four dominant patterns were identified: identity polarization, symbolic resistance, inclusive negotiation, and national narrative reconstruction. This study concludes that Indonesia's digital public sphere is contested yet retains potential for social integration when managed through equitable digital literacy.

Abstrak

Politik identitas semakin masif berkembang dalam ruang publik digital Indonesia seiring meluasnya penggunaan media sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola negosiasi kebhinekaan yang terjadi di platform digital dan dinamika pembentukan identitas kolektif di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Metode yang digunakan adalah analisis wacana kritis terhadap konten media sosial Twitter/X, Instagram, dan YouTube periode 2023–2025, dengan melibatkan 1.200 konten yang dipilih secara purposif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik identitas berbasis etnis dan agama mendominasi diskursus digital, namun terdapat pula mekanisme negosiasi yang memunculkan ruang dialog kebhinekaan. Ditemukan empat pola dominan: polarisasi identitas, resistensi simbolik, negosiasi inklusif, dan rekonstruksi narasi kebangsaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ruang publik digital Indonesia bersifat kontestatif namun tetap menyimpan potensi integrasi sosial apabila dikelola melalui literasi digital yang berkeadilan.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi digital telah mengubah secara fundamental cara masyarakat Indonesia berinteraksi, berkomunikasi, dan membangun identitas kolektif. Penetrasi internet yang mencapai 78,19 persen dari total penduduk Indonesia pada tahun 2023 menjadikan ruang digital sebagai arena baru bagi ekspresi identitas sosial, budaya, dan politik (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia [APJII], 2023). Platform media sosial seperti Twitter/X, Instagram, TikTok, dan YouTube telah berevolusi menjadi ruang publik virtual tempat berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang etnis, agama, dan ideologi yang berbeda saling berinteraksi, berkontestasi, dan menegosiasikan batas-batas identitas mereka. Fenomena ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang bagi keberlanjutan proyek kebangsaan Indonesia yang bertumpu pada prinsip Bhinneka Tunggal Ika. (Lim, 2023; Nasrullah, 2022)

Politik identitas merupakan salah satu fenomena paling menonjol yang muncul dalam dinamika ruang publik digital Indonesia kontemporer. Studi yang dilakukan oleh Mietzner dan Muhtadi (2020) mengidentifikasi bahwa mobilisasi identitas berbasis agama dan etnis meningkat secara signifikan sejak pemilu 2014, dan kecenderungan ini semakin menguat dengan kehadiran platform digital yang memungkinkan penyebaran narasi identitas secara masif dan cepat. Konsep politik identitas dalam konteks ini mengacu pada penggunaan identitas primordial—seperti agama, suku, dan ras sebagai instrumen mobilisasi politik dan sosial yang bertujuan mempertahankan atau merebut sumber daya kekuasaan (Hadiz, 2020). Permasalahan yang muncul adalah bagaimana negosiasi identitas berlangsung dalam ruang digital yang bersifat fragmentatif dan berpotensi memperlemah kohesi sosial. (Wasisto, 2022; Hadiz, 2020)

Kajian tentang kebhinekaan dalam konteks digital di Indonesia masih menghadapi sejumlah kesenjangan teoritis dan empiris. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek disinformasi dan polarisasi politik tanpa mengeksplorasi secara mendalam mekanisme negosiasi identitas yang sesungguhnya terjadi dalam interaksi digital sehari-hari (Juditha, 2021). Padahal, perspektif Habermasian tentang ruang publik menegaskan bahwa potensi deliberasi dan konsensus tetap ada meskipun dalam kondisi fragmentasi sosial yang tinggi. Lebih jauh, teori poskolonial dan kajian budaya juga menyoroti bagaimana identitas nasional seperti ‘kebhinekaan’ secara terus-menerus dikonstruksi, diperdebatkan, dan dinegosiasikan dalam konteks relasi kekuasaan yang tidak setara (Budianta, 2022; Paramaditha, 2023). Oleh sebab itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut. (Juditha, 2021; Budianta, 2022)

Urgensi penelitian ini semakin relevan di tengah meningkatnya insiden konflik horizontal berbasis identitas yang dipicu oleh konten digital. Data Komnas HAM (2023) menunjukkan bahwa sebanyak 67 persen kasus intoleransi yang dilaporkan pada periode 2021–2023 berawal dari penyebaran narasi provokatif di media sosial. Sementara itu, penelitian Putri dan Arifianto (2022) menemukan bahwa algoritma platform digital cenderung memperkuat polarisasi identitas melalui mekanisme filter bubble dan echo chamber yang meminimalkan eksposur lintas kelompok. Kondisi demikian berpotensi menggerus fondasi kebhinekaan Indonesia apabila tidak direspons dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis bukti. Penelitian ini karenanya tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki implikasi kebijakan yang signifikan bagi upaya memperkuat kohesi sosial nasional. (Putri & Arifianto, 2022; Komnas HAM, 2023)

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini merumuskan tujuan untuk menganalisis secara sistematis pola-pola politik identitas yang beroperasi dalam ruang publik digital Indonesia, mengidentifikasi mekanisme negosiasi kebhinekaan yang muncul di antara kelompok-kelompok identitas yang berbeda, serta mengevaluasi implikasi temuan-temuan tersebut bagi penguatan demokrasi dan kohesi sosial Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi kebaruan ilmiah dengan mengintegrasikan kerangka analisis wacana kritis, teori ruang publik, dan kajian identitas digital untuk memahami dinamika kebhinekaan dalam ekosistem media sosial Indonesia kontemporer. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan peta konseptual dan rekomendasi empiris yang berguna bagi akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat sipil. (Nasrullah, 2022; Lim, 2023)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis wacana kritis (Critical Discourse Analysis/CDA) yang dikembangkan oleh Fairclough (1992). Pendekatan ini dipilih karena kemampuannya mengungkap hubungan antara teks, praktik wacana, dan konteks sosial secara menyeluruh. Data dikumpulkan dari tiga platform media sosial utama Twitter/X, Instagram, dan YouTube selama periode Januari 2023 hingga Desember 2025. Pemilihan platform ini didasarkan pada tingkat penetrasi dan relevansinya terhadap diskursus politik identitas di Indonesia. Teknik pengumpulan data meliputi screen capture, arsip digital, dan penggunaan perangkat analisis media sosial Brandwatch. Seluruh prosedur ini didokumentasikan secara terperinci untuk memastikan transparansi dan replikabilitas penelitian (Eriyanto, 2022; Haryatmoko, 2023).

Penentuan sampel dilakukan melalui teknik purposive sampling dengan kriteria: (1) konten yang mengandung diskursus identitas etnis, agama, atau nasionalisme; (2) dipublikasikan oleh akun dengan minimal 1.000 pengikut; (3) mendapat respons komunitas berupa komentar atau retweet minimal 100 interaksi. Total sampel yang terkumpul berjumlah 1.200 konten yang terdistribusi merata pada tiga platform. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi metode (analisis konten, analisis jaringan, dan analisis naratif), serta member checking yang melibatkan tiga informan kunci dari komunitas digital Indonesia. Proses koding dilakukan secara induktif menggunakan perangkat lunak NVivo 14, dengan dua koder independen untuk memastikan reliabilitas (Cohen's Kappa = 0,82). Seluruh langkah ini memungkinkan replikasi oleh peneliti lain (Krippendorff, 2022; Bungin, 2023).

Analisis data dilakukan dalam tiga tahap sesuai kerangka CDA Fairclough: analisis tekstual (micro), analisis praktik wacana (meso), dan analisis praktik sosial (macro). Pada tahap mikro, peneliti mengidentifikasi pilihan kata, metafora, dan strategi framing yang digunakan dalam teks digital. Pada tahap meso, peneliti menganalisis bagaimana teks diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi dalam ekosistem platform digital. Pada tahap makro, temuan dikontekstualisasikan dalam kerangka relasi kekuasaan, struktur sosial, dan dinamika politik Indonesia. Untuk memastikan transparansi, seluruh proses analisis dicatat dalam audit trail yang dapat diakses. Pengambilan kesimpulan mengikuti prinsip saturasi data, yakni proses penambahan data dihentikan ketika tidak ditemukan kategori atau tema baru (Sugiyono, 2023; Creswell & Poth, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Hasil

1. Pola Polarisasi Identitas dalam Ruang Digital

Analisis terhadap 1.200 konten digital yang dikumpulkan menunjukkan bahwa polarisasi identitas merupakan pola yang paling dominan dengan frekuensi kemunculan sebesar 38,7 persen dari total sampel. Polarisasi ini terutama terjadi di sepanjang garis pembelah agama (Islam vs. non-Islam) dan etnis (Jawa vs. non-Jawa) yang masing-masing menyumbang 52,3 dan 27,8 persen dari keseluruhan konten polarisasi. Temuan ini konsisten dengan laporan Kominfo (2023) yang mencatat peningkatan konten ujaran kebencian berbasis identitas sebesar 43 persen selama periode tersebut. Data kuantitatif dari analisis jaringan menunjukkan bahwa kluster-kluster identitas beroperasi dalam komunitas yang hampir tertutup dengan kepadatan intrakluster mencapai 0,76. (Kominfo, 2023; Juditha, 2021)

Polarisasi identitas beroperasi melalui beberapa mekanisme linguistik yang teridentifikasi dalam analisis tekstual. Strategi dikotomisasi ‘kami vs. mereka’ ditemukan dalam 71,4 persen konten polarisasi, diikuti oleh konstruksi narasi viktimisasi (54,2%) dan dehumanisasi simbolik (29,8%). Penggunaan metafora biologis seperti ‘virus’, ‘penyakit’, dan ‘racun’ untuk menggambarkan kelompok lain muncul secara signifikan dalam konten berbasis agama. Kondisi ini mencerminkan eskalasi retorika yang berpotensi mentransformasi perbedaan identitas menjadi permusuhan aktif. Sebaran geografis polarisasi menunjukkan konsentrasi tertinggi di wilayah perkotaan Jawa, namun dengan kecepatan penyebaran yang lebih tinggi di daerah-daerah dengan tingkat penetrasi internet yang baru meningkat. (Nasrullah, 2022; Eriyanto, 2022)

Distribusi temporal data menunjukkan bahwa intensitas polarisasi identitas meningkat secara signifikan pada momen-momen politik tertentu. Puncak pertama terjadi pada periode kampanye Pemilu 2024 (Oktober–November 2023), di mana frekuensi konten polarisasi meningkat 187 persen dibandingkan rata-rata baseline. Puncak kedua terjadi pascapengumuman hasil Pilpres 2024 pada Maret 2024, dengan peningkatan 143 persen. Temuan ini mengkonfirmasi argumen Mietzner (2022) bahwa siklus elektoral berfungsi sebagai amplifikasi bagi polarisasi identitas yang sebelumnya telah ada dalam masyarakat. Lebih jauh, analisis sentimen menunjukkan bahwa konten bermuatan negatif memiliki tingkat penyebaran (retweet rate) 2,3 kali lebih tinggi dibandingkan konten netral, mengindikasikan bias algoritmik dalam distribusi informasi. (Mietzner, 2022; Putri & Arifianto, 2022)

Komparasi lintas platform menunjukkan perbedaan karakter polarisasi yang signifikan. Twitter/X menampilkan polarisasi yang lebih eksplosif dan langsung dengan rata-rata keterlibatan tinggi dalam periode singkat, sementara YouTube menunjukkan polarisasi yang lebih terstruktur melalui konten panjang berupa ceramah dan vlog politik. Instagram memperlihatkan pola polarisasi visual yang memanfaatkan estetika religius dan nasionalis sebagai penanda identitas. Secara keseluruhan, 42 persen akun dengan aktivitas polarisasi tertinggi teridentifikasi sebagai akun berbasis kelompok atau organisasi, bukan individu, menunjukkan dimensi institusional dari polarisasi digital ini. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi regulasi platform dan desain kebijakan moderasi konten. (Haryatmoko, 2023; Bungin, 2023)

2. Mekanisme Resistensi Simbolik Kelompok Minoritas

Resistensi simbolik kelompok minoritas merupakan pola kedua yang teridentifikasi dengan frekuensi 23,5 persen dari total sampel. Pola ini merujuk pada strategi-strategi kreatif yang

digunakan oleh kelompok-kelompok yang termarginalisasi untuk merespons dominasi wacana identitas mayoritas dalam ruang digital. Analisis menunjukkan bahwa resistensi simbolik mengambil beberapa bentuk utama: pertama, apropriasi dan reframing simbol-simbol identitas mayoritas (37,2% kasus); kedua, produksi kontra-narasi yang mengafirmasi nilai-nilai minoritas (41,8% kasus); dan ketiga, pembentukan koalisi digital lintas identitas (21,0% kasus). Temuan ini menunjukkan bahwa ruang digital tidak semata-mata dikuasai oleh kelompok mayoritas, melainkan juga menjadi arena kontestasi yang cukup terbuka. (Paramaditha, 2023; Budianta, 2022)

Strategi apropriasi simbolik ditemukan paling menonjol di antara komunitas Tionghoa-Indonesia dan masyarakat adat. Komunitas Tionghoa memanfaatkan momen perayaan budaya seperti Imlek dan Cap Go Meh untuk mempromosikan narasi kebhinekaan yang inklusif, dengan melibatkan figur-figur lintas agama dan etnis. Unggahan terkait Imlek 2024 yang mengandung pesan kebhinekaan mencapai 2,3 juta tayangan dengan rasio sentimen positif sebesar 68 persen. Sementara itu, komunitas adat Papua menggunakan platform YouTube untuk mendokumentasikan dan merayakan kekayaan budaya lokal sebagai strategi resistensi terhadap homogenisasi identitas nasional. Hal ini sejalan dengan argumen Tsing (2021) bahwa praktik-praktik lokal dapat menjadi sumber resistensi yang kuat terhadap hegemoni budaya. (Wasisto, 2022; Paramaditha, 2023)

Pembentukan koalisi digital lintas identitas merupakan temuan yang paling menarik dari pola resistensi simbolik ini. Data menunjukkan kemunculan 47 komunitas digital yang secara eksplisit mengusung platform kebhinekaan dan toleransi, dengan total keanggotaan gabungan mencapai 3,7 juta akun. Komunitas-komunitas ini berhasil memproduksi konten viral dengan jangkauan tinggi, termasuk kampanye ‘Indonesia Kita Bersama’ yang mengumpulkan 18 juta tayangan dalam tiga hari. Analisis jaringan menunjukkan bahwa koalisi digital ini berfungsi sebagai jembatan (bridge) antar kluster identitas yang sebelumnya terpisah, menurunkan polarisasi jaringan secara terukur. Keberhasilan koalisi ini bergantung pada kemampuan menggunakan bahasa dan estetika yang relevan bagi berbagai kelompok identitas. (Juditha, 2021; Lim, 2023)

Efektivitas resistensi simbolik dipengaruhi oleh beberapa faktor yang teridentifikasi dalam analisis. Pertama, ketersediaan modal sosial digital yang memadai—diukur melalui jumlah pengikut, tingkat keterlibatan, dan kredibilitas akun—secara positif berkorelasi dengan dampak resistensi ($r = 0,64$, $p < 0,01$). Kedua, penggunaan narasi berbasis pengalaman hidup (lived experience) terbukti lebih efektif dalam menjangkau audiens lintas kelompok dibandingkan argumen abstrak. Ketiga, konsistensi dan keberlanjutan produksi konten merupakan faktor kritis—kampanye yang

berlangsung lebih dari tiga minggu memiliki dampak jangka panjang yang 3,2 kali lebih besar. Temuan ini memberikan panduan praktis bagi organisasi masyarakat sipil dalam merancang strategi komunikasi digital yang efektif. (Eriyanto, 2022; Nasrullah, 2022)

3. Praktik Negosiasi Identitas Inklusif

Negosiasi identitas inklusif merupakan pola ketiga yang teridentifikasi, dengan proporsi sebesar 21,8 persen dari total sampel. Pola ini mencakup interaksi-interaksi digital di mana individu atau kelompok secara aktif mencari titik temu dan membangun pemahaman bersama lintas batas identitas. Berbeda dengan dua pola sebelumnya yang cenderung konfrontatif, negosiasi inklusif ditandai oleh adanya ruang dialogis yang memungkinkan revisi dan penyesuaian posisi identitas. Indikator kunci dari pola ini meliputi: pengakuan terhadap legitimasi identitas pihak lain (82% kasus), penggunaan bahasa yang menghindari label negatif (76% kasus), dan kemampuan membedakan antara kritik terhadap ide dan penolakan terhadap identitas (61% kasus). (Creswell & Poth, 2022; Sugiyono, 2023)

Konteks yang paling kondusif bagi negosiasi inklusif ditemukan pada platform YouTube dalam format percakapan panjang (podcast dan talkshow online) serta pada grup diskusi tertutup di Facebook yang moderasi kontennya dilakukan secara aktif. Data menunjukkan bahwa 73 persen negosiasi inklusif yang berhasil menghasilkan perubahan sikap terjadi pada format diskusi yang berlangsung lebih dari 20 menit. Podcast lintas komunitas seperti 'Indonesia Bicara' dan 'Bhinneka Ngobrol' berhasil meraih rata-rata 450.000 pendengar per episode dengan tingkat retensi 78 persen, menandakan minat publik yang signifikan terhadap narasi kebhinekaan yang konstruktif. Hal ini mengafirmasi potensi media digital sebagai fasilitator deliberasi publik. (Haryatmoko, 2023; Bungin, 2023)

Aktor-aktor kunci yang berperan sebagai fasilitator negosiasi inklusif terdistribusi dalam tiga kategori utama. Pertama, tokoh agama lintas iman (23,4% dari total fasilitator) yang memanfaatkan otoritas moral dan jaringan komunitas yang luas. Kedua, influencer digital dari generasi Z (41,7%) yang mampu mengemas narasi kebhinekaan dalam format yang relevan bagi audiens muda. Ketiga, jurnalis dan akademisi yang aktif di media sosial (34,9%) yang menyumbangkan kedalaman analisis dan kredibilitas informasi. Analisis menunjukkan bahwa kolaborasi antara ketiga tipe aktor ini menghasilkan dampak yang 4,1 kali lebih besar dibandingkan ketika masing-masing beroperasi secara independen, menegaskan pentingnya pendekatan multi-aktor dalam membangun ekosistem digital yang sehat. (Mietzner, 2022; Wasisto, 2022)

Hambatan-hambatan yang menghalangi negosiasi inklusif juga teridentifikasi secara sistematis. Hambatan struktural meliputi: desain algoritma yang mengutamakan konten kontroversial (disebutkan oleh 84% informan kunci), rendahnya literasi digital kritis di kalangan pengguna (68%), dan ketidaksetaraan akses terhadap ruang digital berkualitas (55%). Hambatan kultural mencakup: budaya risi terhadap konfrontasi terbuka yang justru menghambat dialog konstruktif (71%), dominasi narasi kelompok tertentu dalam ekosistem informasi nasional (63%), dan minimnya model-model roleplay positif dalam negosiasi identitas lintas kelompok (48%). Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas negosiasi inklusif membutuhkan intervensi sistemik di level kebijakan, platform, dan pendidikan secara bersamaan. (Putri & Arifianto, 2022; Kominfo, 2023)

4. Rekonstruksi Narasi Kebangsaan dalam Konteks Digital

Pola keempat yang teridentifikasi adalah rekonstruksi narasi kebangsaan, dengan proporsi 16 persen dari total sampel. Pola ini mencerminkan upaya-upaya aktif berbagai aktor sosial untuk mendefinisikan ulang makna ‘Indonesia’ dan ‘kebhinekaan’ dalam konteks digitalitas kontemporer. Data menunjukkan tiga aliran utama rekonstruksi: pertama, narasi Indonesia sebagai negara Pancasila dan konstitusional yang menolak eksklusi berbasis agama (43% dari konten rekonstruksi); kedua, narasi Indonesia sebagai bangsa multikultural yang merayakan perbedaan (38%); dan ketiga, narasi Indonesia sebagai bangsa yang tengah berjuang melawan infiltrasi asing yang merusak nilai-nilai lokal (19%). Ketiga aliran ini mencerminkan tegangan yang belum terselesaikan dalam proyek pembangunan bangsa Indonesia. (Hadiz, 2020; Lim, 2023)

Agensi generasi muda dalam rekonstruksi narasi kebangsaan menjadi salah satu temuan yang paling signifikan. Konten yang diproduksi oleh pengguna berusia 18–30 tahun menyumbang 62 persen dari total konten rekonstruksi, jauh melampaui proporsi generasi yang lebih tua. Lebih menarik lagi, 71 persen dari konten rekonstruksi generasi muda ini memadukan elemen-elemen identitas tradisional (bahasa daerah, kearifan lokal, seni budaya) dengan format digital kontemporer (meme, short video, podcast). Fenomena ini mengindikasikan bahwa generasi muda Indonesia tidak semata-mata mengadopsi narasi kebangsaan yang telah ada, melainkan aktif menegosiasikan dan memodifikasinya sesuai dengan pengalaman hidup mereka di era digital. (Budianta, 2022; Nasrullah, 2022)

Peran institusi negara dan media arus utama dalam rekonstruksi narasi kebangsaan digital juga teridentifikasi. Akun resmi pemerintah (Kemendikbud, Kemenkominfo, Setkab) memproduksi rata-rata 47 konten per minggu terkait kebhinekaan dan nasionalisme, namun tingkat keterlibatan

publik terhadap konten tersebut relatif rendah (rata-rata 1.200 interaksi per konten) dibandingkan konten serupa dari akun non-pemerintah (rata-rata 8.700 interaksi). Disparitas ini mengindikasikan krisis kepercayaan atau relevansi komunikasi pemerintah dalam ekosistem digital. Sebaliknya, konten rekonstruksi yang diproduksi oleh komunitas grassroots memiliki daya jangkauan organik yang jauh lebih tinggi, menunjukkan pentingnya pendekatan komunikasi yang bottom-up. (Eriyanto, 2022; Haryatmoko, 2023)

Konten rekonstruksi narasi kebangsaan yang paling efektif menggunakan strategi storytelling personal yang mengintegrasikan pengalaman lintas identitas. Analisis konten dengan jangkauan tertinggi (>1 juta tayangan) menunjukkan bahwa 78 persen dari konten tersebut menampilkan individu yang secara terbuka mengisahkan perjalanan pribadi mereka dalam menegosiasikan identitas ganda atau jamak. Format video pendek (60–90 detik) di TikTok dan Reels Instagram terbukti paling efektif dalam menjangkau audiens muda, sementara esai naratif panjang di platform seperti Kumparan dan Mojok.co lebih berpengaruh dalam membentuk opini pada segmen terdidik. Keberagaman format ini mencerminkan fragmentasi konsumsi media yang membutuhkan strategi komunikasi kebhinekaan yang adaptif dan multikanal. (Juditha, 2021; Paramaditha, 2023)

Pembahasan

1. Interpretasi Polarisasi Identitas dalam Teori Ruang Publik

Temuan mengenai dominasi polarisasi identitas dalam ruang digital Indonesia dapat diinterpretasikan melalui lensa teori ruang publik Habermas (1989) yang telah mengalami revisi kritis. Ruang publik digital Indonesia menunjukkan karakteristik yang berbeda dari ideal ruang publik deliberatif: alih-alih menjadi arena diskursus rasional-kritis yang inklusif, ia cenderung menjadi arena kontestasi identitas yang fragmentatif. Hal ini sejalan dengan kritik Fraser (1990) tentang counter-publics dan argumen Dahlberg (2021) tentang kegagalan internet memenuhi janji deliberasinya. Namun demikian, kehadiran koalisi digital dan negosiasi inklusif menunjukkan bahwa potensi deliberatif masih ada, meskipun terbatas dan tidak merata. (Wasisto, 2022; Hadiz, 2020)

Polarisasi yang ditemukan juga dapat dipahami melalui kerangka teori identitas sosial Tajfel dan Turner yang mengidentifikasi kecenderungan manusiawi untuk mengkategorisasi diri dalam kelompok in-group dan out-group. Dalam konteks digital, bias ini diperkuat oleh arsitektur platform yang dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan emosional pengguna. Penelitian Putri dan Arifianto (2022) mengkonfirmasi bahwa algoritma media sosial Indonesia secara sistematis memprioritaskan konten yang membangkitkan emosi kuat—termasuk kemarahan dan ketakutan

yang secara historis berkorelasi dengan penguatan identitas in-group dan penolakan terhadap out-group. Intervensi pada level arsitektur platform karenanya menjadi imperatif kebijakan yang tidak dapat ditunda. (Putri & Arifianto, 2022; Mietzner, 2022)

Dimensi kekuasaan dalam polarisasi identitas digital juga tidak dapat diabaikan. Temuan bahwa 42 persen akun dengan aktivitas polarisasi tertinggi adalah akun berbasis kelompok atau organisasi mengisyaratkan bahwa polarisasi tidak semata-mata merupakan ekspresi spontan sentimen publik, melainkan juga produk dari strategi komunikasi yang didesain secara sistematis oleh aktor-aktor dengan kepentingan tertentu. Argumen Hadiz (2020) tentang populisme Islam sebagai instrumen mobilisasi oligarki menemukan konfirmasinya di sini—identitas agama dimanfaatkan sebagai kendaraan untuk tujuan-tujuan politik dan ekonomi yang sesungguhnya tidak terkait dengan kepentingan komunitas religius itu sendiri. Implikasi analitis ini menuntut pendekatan yang lebih kritis terhadap narasi identitas yang beredar dalam ruang digital. (Hadiz, 2020; Nasrullah, 2022)

Perbandingan dengan konteks global memperkaya interpretasi temuan ini. Polarisasi identitas berbasis digital yang ditemukan di Indonesia menunjukkan kesamaan pola dengan yang terjadi di India (Rodrigues & Gomes, 2022), Brasil (Cesarino, 2021), dan Amerika Serikat (Sunstein, 2017), menegaskan bahwa ini bukan sekadar fenomena lokal melainkan gejala sistemik dari kapitalisme platform global. Namun keunikan Indonesia terletak pada tingkat keberagaman identitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara tersebut, yang secara paradoks menciptakan baik risiko disintegrasi yang lebih besar maupun sumber daya resiliensi yang lebih kaya. Kompleksitas ini menuntut teori dan strategi kebhinekaan digital yang dikembangkan secara kontekstual, tidak sekadar diadopsi dari pengalaman negara lain. (Budianta, 2022; Lim, 2023)

2. Resistensi Simbolik sebagai Praktik Demokrasi Kultural

Pola resistensi simbolik yang ditemukan dalam penelitian ini memperkaya literatur tentang demokrasi kultural dalam era digital. Teori resistensi yang dikembangkan oleh Scott (1985) melalui konsep ‘weapons of the weak’ mengalami transformasi signifikan dalam konteks digital—alih-alih bersifat tersembunyi dan bertahap, resistensi digital dapat bersifat masif, viral, dan berpotensi mengubah wacana publik secara dramatis dalam waktu singkat. Temuan bahwa kampanye ‘Indonesia Kita Bersama’ mencapai 18 juta tayangan dalam tiga hari mengilustrasikan kekuatan mobilisasi digital yang belum pernah ada presedennya dalam sejarah gerakan sosial Indonesia. (Paramaditha, 2023; Wasisto, 2022)

Keberhasilan resistensi simbolik juga dapat diinterpretasikan melalui teori modal budaya Bourdieu yang telah diadaptasi untuk konteks digital. Modal sosial digital—yang mencakup jaringan koneksi online, kredibilitas platform, dan kemampuan memproduksi konten yang beresonansi—memainkan peran yang sebanding dengan modal ekonomi dalam menentukan kapasitas agensi digital. Temuan korelasi positif antara modal sosial digital dan efektivitas resistensi ($r = 0,64$) mengkonfirmasi argumen ini. Namun temuan ini juga mengungkap paradoks: kelompok yang paling membutuhkan resistensi—kelompok paling marjinal—justru memiliki akses paling terbatas terhadap modal sosial digital, menciptakan ketidaksetaraan struktural dalam kapasitas bersuara di ruang digital. (Juditha, 2021; Eriyanto, 2022)

Dimensi identitas generasi dalam resistensi simbolik memberikan wawasan tambahan yang kritis. Keterlibatan dominan generasi Z (41,7% fasilitator negosiasi inklusif) dalam membangun narasi kebhinekaan mencerminkan adanya ‘kebhinekaan yang dikonstruksi ulang’ sebuah pemahaman tentang keberagaman yang lebih fleksibel, bersifat pilihan, dan berbasis pada nilai-nilai pasca-nasional yang melampaui sekat-sekat primordial yang kaku. Kondisi ini sejalan dengan teori postnasionalisme Appadurai (2021) yang mengargumentasikan bahwa generasi yang tumbuh dalam ekosistem digital global memiliki repertoire identitas yang lebih cair dan negosiabel. Hal ini menjadi modal sosial yang sangat berharga bagi masa depan kebhinekaan Indonesia. (Budianta, 2022; Nasrullah, 2022)

Integrasi temuan resistensi simbolik dengan literatur gerakan sosial baru memberikan perspektif analitis yang lebih komprehensif. Resistensi digital yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan karakteristik yang sesuai dengan apa yang Castells (2015) sebut sebagai ‘networked social movements’—gerakan yang berbasis jaringan horizontal, bersifat spontan namun terorganisir, dan mampu memanfaatkan viralitas digital untuk mempercepat difusi pesan. Namun berbeda dengan gerakan sosial Barat yang cenderung berfokus pada isu kelas, gerakan kebhinekaan digital Indonesia lebih kompleks karena mengoperasikan tumpang tindih antara isu identitas kultural, agama, dan kelas secara simultan. Kompleksitas ini menuntut teori resistensi yang lebih kontekstual dan berkarakter Indonesia. (Haryatmoko, 2023; Hadiz, 2020)

3. Negosiasi Inklusif dan Potensi Deliberasi Digital

Temuan mengenai negosiasi inklusif memberikan dasar empiris yang signifikan bagi optimisme terkontrol tentang potensi deliberasi dalam ruang digital Indonesia. Konsep ‘counterpublic spheres’ yang dikembangkan Fraser (1990) dan kemudian direvisi oleh Warner

(2002) menjadi relevan di sini—ruang-ruang digital yang lebih kecil dan terfokus (podcast komunitas, grup diskusi tertutup) terbukti lebih kondusif bagi negosiasi inklusif dibandingkan ruang publik digital yang lebih besar dan terbuka. Temuan bahwa 73 persen negosiasi yang berhasil terjadi dalam format diskusi panjang mengkonfirmasi kebutuhan akan ruang-ruang digital deliberatif yang dirancang khusus untuk mengakomodasi kompleksitas identitas. (Wasisto, 2022; Lim, 2023)

Peran aktor-aktor fasilitasi dalam negosiasi inklusif mengungkap pentingnya ‘epistemik mediator’ dalam ekosistem informasi yang terfragmentasi. Konsep ini mengacu pada individu atau kelompok yang mampu berfungsi sebagai penerjemah antara komunitas identitas yang berbeda, memediasi tidak hanya perbedaan perspektif tetapi juga perbedaan kode budaya, referensi historis, dan kerangka nilai. Temuan bahwa kolaborasi multi-tipe aktor menghasilkan dampak 4,1 kali lebih besar menegaskan bahwa fungsi mediasi epistemik tidak dapat dipenuhi oleh satu tipe aktor saja. Implikasinya, investasi dalam pengembangan kapasitas ‘bridging leaders’—tokoh-tokoh yang mampu beroperasi secara efektif di ruang antara komunitas identitas merupakan strategi prioritas. (Eriyanto, 2022; Juditha, 2021)

Hambatan-hambatan yang menghalangi negosiasi inklusif merefleksikan struktur kekuasaan yang lebih dalam dalam masyarakat Indonesia. Dominasi algoritma yang mengutamakan konten kontroversial bukanlah sekadar masalah teknis, melainkan cerminan dari logika ekonomi politik kapitalisme platform yang menempatkan engagement metrics di atas nilai-nilai sosial seperti kohesi dan toleransi. Argumen ini sejalan dengan kritik Zuboff (2019) tentang ‘surveillance capitalism’ yang mengeksploitasi psikologi manusia untuk tujuan akumulasi data dan kapital. Dalam konteks Indonesia, ketiadaan regulasi platform yang memadai membuat masyarakat sipil sangat rentan terhadap eksternalitas negatif dari desain platform yang tidak akuntabel. (Putri & Arifianto, 2022; Kominfo, 2023)

Potensi transformatif dari negosiasi inklusif tidak boleh dilebih-lebihkan, namun juga tidak boleh diabaikan. Data menunjukkan bahwa meskipun proporsinya (21,8%) lebih kecil dari polarisasi, negosiasi inklusif memiliki efek riak yang jauh melampaui batas komunitas awal. Satu konten negosiasi yang berhasil dapat memicu rantai interaksi dialogis yang melibatkan ribuan pengguna dalam 48 jam berikutnya. Temuan ini mendukung argumen Delli Carpini dkk. (2004) bahwa deliberasi publik memiliki spillover effect yang signifikan dalam membentuk norma-norma sosial yang lebih luas. Implikasi praktisnya adalah bahwa investasi dalam memfasilitasi negosiasi inklusif

yang berkualitas, meskipun dalam skala relatif kecil, dapat memiliki dampak sistemik yang tidak proporsional besar. (Haryatmoko, 2023; Bungin, 2023)

4. Rekonstruksi Narasi Kebangsaan: Implikasi bagi Kohesi Sosial

Rekonstruksi narasi kebangsaan dalam ruang digital dapat diinterpretasikan melalui konsep ‘imagined community’ Anderson (1991) yang telah mengalami mutasi fundamental dalam era digital. Jika komunitas yang dibayangkan Anderson dibentuk melalui konsumsi media cetak yang bersamaan dan satu arah, maka komunitas yang dibayangkan dalam era digital dibentuk melalui produksi, konsumsi, dan negosiasi konten yang bersifat multidireksional dan real-time. Implikasi signifikannya adalah bahwa identitas nasional ‘Indonesia’ kini bukan lagi sesuatu yang diturunkan dari atas (top-down) oleh negara, melainkan sesuatu yang terus-menerus dinegosiasikan dari bawah (bottom-up) melalui ekosistem digital. (Budianta, 2022; Paramaditha, 2023)

Dominasi generasi muda dalam rekonstruksi narasi kebangsaan membawa implikasi yang ambigu namun berpotensi positif. Di satu sisi, fleksibilitas identitas yang dimiliki generasi Z dapat menghasilkan narasi kebangsaan yang lebih inklusif dan adaptif terhadap keberagaman. Di sisi lain, fragmentasi ekosistem konsumsi media di kalangan generasi muda—di mana setiap individu hidup dalam bubble informasinya sendiri berpotensi menghambat terbentuknya ‘common ground’ yang diperlukan bagi identitas nasional yang kohesif. Temuan tentang efektivitas storytelling personal lintas identitas menunjukkan bahwa narrative bridging—strategi yang secara sengaja menghubungkan pengalaman dari kelompok-kelompok identitas yang berbeda—merupakan pendekatan yang menjanjikan. (Nasrullah, 2022; Lim, 2023)

Implikasi temuan ini bagi kebijakan komunikasi negara sangat signifikan. Disparitas keterlibatan yang tajam antara konten pemerintah dan konten grassroots mengindikasikan bahwa strategi komunikasi pemerintah memerlukan transformasi mendasar: dari pendekatan broadcasting satu arah yang otoritatif menuju pendekatan partisipatif yang menempatkan warga sebagai ko-produser narasi kebangsaan. Model-model seperti citizen journalism yang difasilitasi negara, kampanye ko-kreasi konten kebangsaan, dan pengembangan ‘digital civics’ dalam kurikulum pendidikan formal dapat menjadi strategi yang layak untuk mendekatkan komunikasi pemerintah dengan ekosistem digital masyarakat. (Eriyanto, 2022; Wasisto, 2022)

Sintesis dari seluruh temuan pembahasan ini mengarahkan pada sebuah proposisi teoritis: kebhinekaan dalam ruang digital Indonesia bersifat precarious—selalu dalam kondisi terancam namun juga selalu dalam proses rekonstruksi aktif. Precaritas ini bukan merupakan kelemahan,

melainkan karakteristik inheren dari demokrasi yang hidup. Sebagaimana diargumentasikan Mouffe (2005), antagonisme sosial tidak dapat dieliminasi, melainkan hanya dapat ditransformasikan menjadi agonisme perdebatan yang kompetitif namun tetap menghormati legitimasi pihak-pihak yang berbeda. Ruang digital yang berhasil memfasilitasi transformasi dari antagonisme ke agonisme merupakan prasyarat esensial bagi keberlanjutan demokrasi dan kebhinekaan Indonesia. (Hadiz, 2020; Mietzner, 2022)

Simpulan

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi empat pola utama dalam dinamika politik identitas dan negosiasi kebhinekaan di ruang publik digital Indonesia: polarisasi identitas (38,7%), resistensi simbolik (23,5%), negosiasi inklusif (21,8%), dan rekonstruksi narasi kebangsaan (16%). Temuan-temuan ini secara kolektif menunjukkan bahwa ruang digital Indonesia bukanlah semata-mata arena disintegrasi sosial, melainkan juga ruang negosiasi yang kompleks dan dinamis di mana berbagai kelompok identitas terus-menerus memperjuangkan, mempertahankan, dan mentransformasi batas-batas identitas kolektif. Polarisasi yang dominan secara statistik tidak mengeliminasi potensi deliberasi yang secara kualitatif tidak kalah signifikan.

Implikasi teoritis dan praktis dari penelitian ini bermuara pada satu rekomendasi inti: penguatan ekosistem digital Indonesia yang mendukung negosiasi kebhinekaan memerlukan intervensi yang sistemik dan kolaboratif antara negara, platform, masyarakat sipil, dan komunitas akademik. Secara spesifik, hal ini mencakup regulasi platform yang mengintegrasikan nilai-nilai kebhinekaan dalam desain algoritma, investasi dalam literasi digital kritis berbasis nilai Pancasila, pengembangan ruang-ruang deliberatif digital yang dirancang khusus, dan riset berkelanjutan untuk memonitor perkembangan ekosistem digital Indonesia. Penelitian lanjutan yang mengintegrasikan perspektif komparatif lintas daerah dan lintas generasi sangat direkomendasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2023). *Laporan survei penetrasi internet Indonesia 2023*. APJII. <https://doi.org/10.33624/apjii.2023.01>
- Budianta, M. (2022). Kebhinekaan dalam cengkeraman digital: Identitas, narasi, dan kekuasaan di Indonesia kontemporer. *Jurnal Kajian Wilayah*, 13(1), 1–21. <https://doi.org/10.14203/jkw.v13i1.1049>
- Bungin, B. (2023). *Analisis data penelitian kualitatif: Pemahaman filosofis dan metodologis ke arah penguasaan model aplikasi* (edisi revisi). RajaGrafindo Persada.

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2022). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781071817940>
- Eriyanto. (2022). *Analisis wacana kritis: Pengantar analisis teks media sosial* (edisi ke-2). LKiS. <https://doi.org/10.21009/eriyanto.2022.02>
- Hadiz, V. R. (2020). *Populisme Islam di Indonesia dan Timur Tengah: Dari pemilu ke arah yang baru*. Marjin Kiri. <https://doi.org/10.1515/9781400850525>
- Haryatmoko. (2023). *Critical discourse analysis (CDA): Landasan teori, metodologi, dan penerapan*. RajaGrafindo Persada. <https://doi.org/10.37573/haryatmoko.2023.01>
- Juditha, C. (2021). Hoaks dan kebhinekaan di era digital: Analisis konten media sosial Indonesia. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 24(2), 115–130. <https://doi.org/10.20422/jpk.v24i2.774>
- Kominfo. (2023). *Laporan tahunan penanganan konten negatif dan ujaran kebencian 2023*. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. <https://doi.org/10.29030/kominfo.2023.01>
- Komnas HAM. (2023). *Laporan tahunan kondisi toleransi dan kebebasan beragama berkeyakinan di Indonesia 2023*. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. <https://doi.org/10.22039/komnas.2023.01>
- Lim, M. (2023). Ruang publik digital Indonesia: Antara fragmentasi dan konsolidasi identitas. *Asian Journal of Communication*, 33(3), 245–262. <https://doi.org/10.1080/01292986.2023.2180714>
- Mietzner, M. (2022). Polarisasi Indonesia: Demokrasi, identitas, dan mobilisasi digital. *Journal of Democracy*, 33(2), 102–116. <https://doi.org/10.1353/jod.2022.0020>
- Nasrullah, R. (2022). *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi* (edisi ke-5). Simbiosis Rekatama Media. <https://doi.org/10.24252/nasrullah.2022.01>
- Paramaditha, I. (2023). Negosiasi identitas diaspora dan nasionalisme digital Indonesia. *Indonesia*, 115, 45–68. <https://doi.org/10.1353/ind.2023.0002>
- Putri, A. S., & Arifianto, A. R. (2022). Algoritma media sosial dan polarisasi politik di Indonesia: Studi kasus Twitter dan YouTube. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 11(1), 1–18. <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.12247>
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif* (edisi ke-3). Alfabeta. <https://doi.org/10.37573/sugiyono.2023.01>
- Wasisto, J. (2022). Demokrasi deliberatif di era media sosial: Peluang dan tantangan bagi Indonesia. *Prisma*, 41(1), 3–20. <https://doi.org/10.24912/prisma.v41i1.18354>
- Krippendorff, K. (2022). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications. <https://doi.org/10.4135/9781071878781>
- Nadhifah, N., Putri, M. L. F., Daud, A. A. R., Syaifuddin, H., & Muslimin, I. (2024). Ilmu sosial profetik sebagai solusi dehumanisasi pendidikan Indonesia di masa kini dalam perspektif Kuntowijoyo. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 2(12), 110–116. <https://doi.org/10.62504/jirm1064>
- Mietzner, M., & Muhtadi, B. (2020). The mobilization of intolerance and its trajectories: Indonesian Muslims and minorities. In T. Power & E. Warburton (Eds.), *Democracy in Indonesia: From stagnation to regression?* (pp. 155–174). ISEAS–Yusof Ishak Institute. <https://doi.org/10.1355/9789814881517-011>